



LAPORAN

PENGELOLAAN RISIKO

TRIWULAN II TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN LAMONGAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

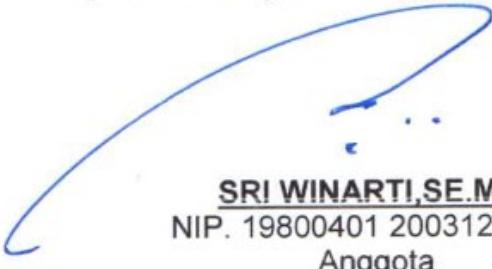
Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 57, Lamongan Kode Pos 62214

Telp. (0322) 323365 Fax. (0322) 313857 Pos- el :dpmpptsp@lamongankab.go.id

Laman : www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN : 710/ 524 /413.111/2025

TANGGAL : 15 Juli 2025

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi  SRI WINARTI, SE, MM. NIP. 19800401 200312 2 006 Anggota
Diperiksa	:	Sekretaris  Ir. YAYUK SRI RAHAYU, ST, MT. NIP. 19690428 200112 2 003 Koordinator
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan  Drs. HAMDANI AZAHARI, MM. NIP. 19651021 198602 1 003 Ketua

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manajemen risiko adalah proses perencanaan kegiatan yang dibuat untuk mengantisipasi terjadinya risiko Organisasi. Termasuk adanya kegiatan identifikasi, perencanaan, strategi, dan penilaian hal-hal negatif yang dapat terjadi. Penerapan manajemen Resiko berpijak pada konsep SPIP yang telah dilaksanakan dan terintegrasi dengan strategi manajemen. Proses atau fungsi manajemen resiko sering diterjemahkan dalam tiga langkah yaitu perencanaan ,pelaksanaan, dan pengendalian. Manajemen resiko diharapkan membuat organisasi menjadi sadar resiko dan lebih berhati - hati dalam pengambilan keputusan. Hasil yang diharapkan adalah keputusan yang tepat dan optimal bagi organisasi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (I) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko. Maka Organisasi Perangkat Daerah diharapkan dapat mengidentifikasi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana. Berdasarkan Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/193/KEP/413.013/2024 tentang Struktur pengelolaan risiko Kabupaten Lamongan maka Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dilaksanakan manajemen Risiko untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan daerah kreatif berwawasan budaya dan keseimbangan menuju keharmonisan sesuai visi Terwujudnya kejayaan Lamongan yang berkeadilan.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Lampiran Peraturan Deputi Bidang Pengawas Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Lamongan;

4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan
6. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/193/KEP/413.013/2024 tentang Struktur pengelolaan risiko Kabupaten Lamongan

C. Maksud dan Tujuan

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

1.4 Ruang Lingkup

Manajemen risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- a. Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- b. Identifikasi risiko ;
- c. Analisis risiko ;
- d. Evaluasi risiko ;
- e. Pengendalian risiko ;
- f. Pemantauan dan telaah ulang ;
- g. Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tribulan II

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada tribulan II sebagaimana terlampir.

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Tribulan II

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko-risiko yang dilaksanakan pada Tribulan II sebagaimana terlampir

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko antara lain Keterbatasan kapasitas ASN pengelola managemen risiko sehingga menjadi penghambat dalam merumuskan rencana tindak pengendalian terhadap risiko yang ada

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada tribulan II dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum perlu dilakukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode tribulan berikutnya, dari hasil capaian kinerja yang sudah terealisasi menandakan bahwa risiko sudah dapat di minimalisir dan sisa risiko dapat diselesaikan pada tribulan II. Sehingga Rencana tindak pengendalian yang sudah ada untuk terus dilaksanakan sesuai dengan jadwal rencana yang sudah di tentukan sampai dengan akhir tahun.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II dapat simpulan bahwa sebagai tindak lanjut

dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai upaya perbaikan.selain itu peranan unit pengendali risiko sangat penting dalam pengelolaan risiko di mulai dari identifikasi risiko,pelaksanaan kegiatan,penyusunan rencana tindak pengendalian dan pemantauan.sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja kami akan melakukan evaluasi dan review terhadap rencana tindak pengendalian secara terpadu serta peningkatan kapasitas SDM pengelola Risiko.

LAMPIRAN

1. Rencana Kegiatan TB II
2. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko TB II
3. Identifikasi Risiko Operasional OPD
4. Identifikasi Risiko Strategis OPD
5. Kertas Kerja Operasional OPD
6. Kertas Kerja Strategis OPD



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 57, Lamongan Kode Pos 62214

Telp. (0322) 323365 Fax. (0322) 313857 Pos- el : dpmptsp@lamongankab.go.id

Laman : www.lamongankab.go.id

RENCANA KEGIATAN (PRA PLANNING) TRIBULAN II TAHUN 2025 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN

NO	URAIAN	TUJUAN	PELAKSANAAN	KET.
1.	Melaksanakan Kegiatan Rapat Persiapan Penyusunan IKM Eksternal dan Internal	Mengetahui tingkat kepuasan Masyarakat dan internal DPMPTSP dalam Pelayanan Perizinan	Survey responden dimulai pada bulan April sd Juni 2025, pelaksanaan rapat penyusunan dokumen IKM pada pertengahan Juni 2025	Risiko yang dihadapi sulitnya kesadaran masyarakat untuk mengisi aplikasi/ quisioner
2.	Melaksanakan Kegiatan Gathering Investasi Penanaman Modal	Menarik Investor untuk masuk berinvestasi di Kabupaten Lamongan	25 Juni 2025	Pelaksanaan kegiatan tidak teranggarkan dalam DPA akan tetapi partisipasi para pelaku usaha

Lamongan, 02 April 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN LAMONGAN



Drs. HAMDANI AZAHARI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19651021 198602 1 003

REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIWULAN II

Kegiatan : FGD Mitigasi Risiko Internal DPMPTSP - Persiapan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JI.Dr.Wahidin SudiroHusodo No.57,Lamongan Kode Pos 62214
Telp. (0322) 323365 Fax. (0322) 313857 Pos- el :dpmptsp@lamongankab.go.id
Laman : www.lamongankab.go.id

NOTULEN

Tim Penyediaan Pelayanan Berusaha melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2025

Dalam Rangka Rapat Persiapan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

A. Pelaksanaan

Rapat dilaksanakan pada :

- Hari/ Tanggal : Rabu, 18 Juni 2025
- Waktu : 8.30 WIB
- Tempat : Ruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan

B. Pemimpin Rapat

Rapat dipimpin oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan

C. Peserta Rapat

Peserta Rapat terdiri dari Anggota penyediaan pelayanan berusaha melalui sistem pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara eletronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2025

D. Maksud dan Tujuan

- Maksud dilaksanakannya rapat adalah untuk mengetahui hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan Tim penyusun sebelum melakukan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat untuk Semester I Tahun 2025, seperti : Meyiapkan Quisioner online yang telah di isi oleh responden untuk diolah melalui sistem pengolahan data online sampai mendapatkan skoring untuk nilai indeks Kepuasan Masyarakat.
- Tujuan dilaksanakannya rapat adalah untuk pemberitahuan terhadap tim tentang nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang didapat dari tabulasi data survei Kepuasan Masyarakat Semester I Tahun 2025

E. Kesimpulan

1. Guna mendukung kelancaran penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, anggota tim harus mempersiapkan semua data berupa quisioner dan informasi pendukung yang diperlukan
2. Data berupa quisioner bersumber dari responden yang mendapatkan pelayanan perizinan dalam proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai pelaku usaha di wilayah Kabupaten Lamongan yang diterbitkan melalui Sistem Online Single Submission (OSS) dan MPP digital.

F. Penutup

Rapat ditutup dengan doa bersama pada pukul 12.00 WIB

Pemimpin Rapat

Drs. Hamdani Azahari,MM

Lamongan, 18 Juni 2025
Notulen,

Sri Winarti,SE.MM

Lampiran Dokumentasi Kegiatan Internal DPMPTSP



Kegiatan : FGD Mitigasi Risiko Bersama Investor – Gathering Investasi



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JI.Dr.Wahidin Sudiro Husodo No.57,Lamongan Kode Pos 62214
Telepon (0322) 323365, Faksimile (0322) 313857, Pos-el dpmptsp@lamongankab.go.id
Laman www.lamongankab.go.id

Lamongan, 30 Juni 2025

Nomor : 500.16.4.5/461/413.111/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Laporan pelaksanaan acara Gathering Investasi.**

Yth. : Bpk. Bupati Lamongan

Di

L A M O N G A N

Bersama ini disampaikan dengan hormat laporan hasil pelaksanaan acara Gathering Investasi dengan rincian sebagai berikut:

I. Latar belakang

Thema dari acara Gathering Investasi ini adalah "**MENJEMPUT INVESTASI UPAYA PENINGKATAN EKONOMI**". Hal ini bermakna bahwa Upaya menjemput investasi dengan berbekal Kabupaten Lamongan memiliki Potensi dan Peluang investasi dimulti sektor, serta ditunjang infrastruktur investasi yang memadai merupakan prospek dan strategis bagi investasi.

Proses pelayanan perizinan yang mudah melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Kondisi sosial, ekonomi, politik, keamanan, ketentraman masyarakat yang kondusif sangat mendukung kegiatan investasi.

Sehingga dengan kehadiran investasi di Kabupaten Lamongan akan berdampak bagi peningkatan ekonomi Kabupaten.

II. Maksud Tujuan acara

Maksud dan tujuan dilaksanakan acara Gathering Investasi adalah:

- a) Menginformasikan potensi dan peluang investasi di Kabupaten Lamongan;
- b) Sebagai komitmen bahwa Kabupaten Lamongan "Wellcome Investasi" dan merupakan tujuan investasi yang mudah, strategis, prospektif, dan kondusif.
- c) mengajak para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Lamongan sebagai sarana penyediaan lapangan kerja dan *multiplier effect* bagi peningkatan perekonomian di Kabupaten Lamongan.

III. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan acara Gathering Investasi:

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Juni 2025
Pukul : 09.00 WIB – 13.00 WIB
Tempat : Pendopo Lokatantra Kabupaten Lamongan

IV. Pemberi Sambutan dan Materi:

Para Narasumber yang akan memberikan materi paparan adalah:

1. **Ibu Dr. Ir. Dyah Wahyu Ernawati M.A.**, Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Jawa Timur.
Materi: "Arah baru Pelayanan Perizinan Investasi Daerah Inklusif, Digital dan berkelanjutan, upaya meningkatkan investasi".
2. **Bpk. DR. David Sukardi Kodrat, MM., CLC., CPM., CRME.** (Profesional dan Dosen Univ Ciputra)
Materi:
 - a. "Arah Kebijakan Investasi & Perekonomian nasional"
 - b. "Tantangan & peluang sektor industri ditengah dinamika global"
3. Bpk. M. Barik Batahaluddin (Deputi Direktur Kantor Perwakilan BI Jatim)
Materi:
"Penguatan Ekonomi Daerah melalui Sinergi Investasi dan Stabilitas Moneter".
4. Bpk. Prasetya Bagus (Wakil Bendahara Umum BPD HIPMI Jatim).
Materi:
"Peran HIPMI membangun Eksistensi Investasi di Daerah"
5. Sebagai Moderator Diskusi Panel : **Sdr. Umar R Hidayat, M.Psi, CHt, CRM.**
Profesi: Founder MAKNA Consulting
Trainer, Motivator, Nara sumber, Instruktur Dalam Manajemen Bisnis, Manajemen Pemerintahan/ Pelayanan Publik, Manajemen Mutu ISO, Training Manajemen SDM Dan Praktisi Terapi Psikologis.

V. Para Undangan Yang Hadir:

Para undangan sebanyak 135 orang terdiri dari :

- a. Konjen Asing dan Asosiasi Negara Asing: 3 orang, Konsulat Jepang (1 orang) dan Tiongkok China (2 orang)
- b. Para pengusaha HIPMI 30 orang
- c. Pengusaha existing 40 orang.
- d. Pengusaha sekitar Kab Lamongan 10 orang
- e. Perbankan dan lembaga lainnya 10 orang.
- f. Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan 40 orang

VI. Kerja Kolaborasi:

Kegiatan ini kolaborasi antara DPMPTSP Kabupaten Lamongan dengan HIPMI Cabang Lamongan, dengan pembagian tugas :

1. Tugas HIPMI Cabang Lamongan.
 - a. Mencari petugas sebagai Moderator acara gathering. Menyiapkan Dekorasi tempat acara dan penataan undangan, sound system dsb.
 - b. Mengundang Narsum Ketua HIMPI Jatim dan Moderator.
 - c. Mengundang para pengusaha HIMPI.
 - d. Membuat Banner "SELAMAT DATANG PARA PESERTA GATHERING INVESTASI"

2. Tugas DPMPTSP :
 - a. Catering untuk 125 orang
 - b. Mendatangkan narsum DR. David, Kepala DPMPTSP Prov Jatim, BI Perwakilan Jatim
 - c. Membuat surat permohonan Narsum, Undangan, pinjam tempat, permintaan MC dan Dirigen, Tari Pembuka.
 - d. Pengiriman undangan untuk OPD Terkait, Pengusaha Existing
 - e. Permohonan surat fasilitasi mengundang Konjen dan Assosiasi pengusaha sebanyak 15 orang.

VII. Sumber Dana

Sumber dana kegiatan ini berasal dari partisipasi dari beberapa perusahaan antara lain: PT. JakaMitra Indonesia, Alfamart, Indomart, MPS Tani Mulyo-PT. Sampoerna Lamongan, MPS Minatani-PT. Sampoerna Brondong, CV Hartono Multiguna, Bank Jatim, BRI, BSI, PT. Caranggana Daksa Perkasa, RS. Permata Hati, PT. Widiantara Perdana Putra, PT. LIS, Gudang Garam.

VIII. Penyerahan sertifikat penghargaan oleh Bapak Bupati kepada para pengusaha :

- a. Sertifikat CSR, simbolis 5 perusahaan dari 24 perusahaan penerima sertifikat:
 - 1) Bank Jatim KC Lamongan
 - 2) PT. Sekar Golden Harvest Indonesia
 - 3) PT. Omya Indonesia
 - 4) PT. Mahan Indo Global
 - 5) PT. Quality Works
 - 6) PT. Sampoerna KUD Tani Mulyo Lamongan
 - 7) CV. Hartono Multiguna Suksesindo
 - 8) PT. Dowa Ecosystem Indonesia
- b. Penghargaan penyampaian LKPM dengan tingkat kepatuhan tertinggi:
 1. PT. QL Hasil Laut
 2. PT. Buildyet Indonesia
 3. PT. Omya Indonesia
- c. Penghargaan capaian nilai realisasi investasi tertinggi:
 1. PT. Kebun Tebu Mas
 2. PT. Jaka Mitra Indonesia
 3. PT. Lamongan Integrated Shorebase

IX. Sesi Tanya Jawab:

Ada 3 orang penanya dari peserta Gathering:

- a. Dari manajemen PT. Lamongan Shorebase.

Agar Pemerintah Kabupaten Lamongan memprioritaskan infrastruktur jalan yang bisa menghubungkan wilayah tengah dan, selatan kearah pantura menuju pelabuhan laut Lamongan Shorebase. Infonya jalan raya Sukodadi-Paciran sudah diambil alih menjadi jalan Provinsi, hal ini agar dipercepat pembangunannya utamanya lebar jalan untuk memudahkan akses kendaraan container. Kami mmengusulkan exit jalan tol agar memudahkan akses kearah pelabuhan di Pantura.

Jawab::

Memang infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas kami, apalagi jalan untuk kelancaran investasi. Jalan raya Sukodadi-Paciran sudah diambil alih menjadi jalan Provinsi, untuk pelebaran dan pembangunannya sedang diusulkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemda Lamongan juga terus

berupayah agar akses ke pelabuhan di Pantura menjadi mudah, demikian usulan terkait exit jalan tol apabila nanti dibangun di sisi utara Lamongan.

b. Dari HIPMI Lamongan.

Perlunya kemudahan informasi peruntukan lahan, untuk menghindari kegagalan investasi karena investor sudah beli lahan ternyata peruntukannya tidak sesuai.

Jawab:

Kepada para investor apabila mencari kebutuhan lahan investasi bisa akses ke aplikasi skala.lamongankab.go.id atau konsultasi ke DPMPTSP Lamongan Perangkat Daerah terkait Investasi.

c. Dari PT. Citi Plump Indonesia.

Mohon penjelasan apakah diperbolehkan pendirian RS PMA dan dilokasi mana yang bisa didirikan RS tersebut. Apakah di kabupaten Lamongan ada program kaitperubahan mesin-mesin produksi kami.

Jawab:

Pemda Lamongan telah melakukan pembangunan RS untuk pemerataan pelayanan kesehatan di beberapa wilayah: Ngimbang, Babat, dan Brondong. Silahkan apabila investasi RS PMA, tentu saja dengan mutu yang baik, untuk melayani pasien yang berkeinginan berobat ke luar negeri. Lokasi RS bisa saja di Lamongan bagian utara.

Terkait penggunaan Gas, karena gas merupakan bahan bakar yang diatur oleh Pemerintah Pusat, maka kita akan mengikuti apabila program Gas dilaksanakan di Kabupaten Lamongan untuk industri.

X. Susunan acara Gathering investasi dan beberapa dokumentasi sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon petunjuk lebih lanjut,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN



Drs. HAMDANI AZAHARI, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19651021 198602 1 003

Lampiran Dokumentasi Kegiatan Gathering Investasi



Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Lamongan Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Lamongan Tahun Penilaian : 2025 Periode yang dinilai : 2025 Tujuan Strategis : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan Sasaran strategis OPD : Meningkatnya Efektivitas Investasi dan Meningkatnya Pelayanan Perizinan Urusan Pemerintahan : Penanaman Modal OPD yang Dinilai : Pemerintah Kabupaten Lamongan											
No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C / U C	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	PENANAMAN MODAL										
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA										
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan	Perencanaan	Risiko Operasional Kegiatan Laporan penyusunan dokumen perencanaan	ROO.19.03.36.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya koordinasi dengan Bappelitbangda	Internal	C	Perencanaan kurang tepat	DPMPTSP

				perangkat daerah tidak sesuai							
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan	Perencanaan	Risiko Operasional Kegiatan Laporan Evaluasi perangkat daerah kurang tepat	ROO.19.03.36.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya koordinasi dengan Bappelitbangda	Internal	C	Perencanaan kurang tepat	DPMPTSP
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkan ya Jaminan	Pertanggung jawaban	Risiko Operasional Kegiatan Laporan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak tepat waktu	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya Koordinasi dengan BPKAD	Internal	C	Pembayaran tidak dapat segera direalisasikan	DPMPTSP
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Kegiatan	Pelaporan	Risiko Operasional Kegiatan koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD tidak tepat waktu	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya Koordinasi dengan BPKAD	Internal	C	Pelaporan kurang tepat waktu	DPMPTSP
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Kegiatan	Pelaporan	Risiko Operasional Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya Koordinasi dengan BPKAD	Internal	C	Pelaporan kurang tepat waktu	DPMPTSP

				Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD tidak tepat waktu							
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Kegiatan	Pertanggung jawaban	Risiko Operasional Kegiatan Laporan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya tidak sesuai	ROO.19.03.02.5.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya disiplin Pegawai	Internal	C	Pelaporan kurang tepat waktu	DPMPTSP
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Kegiatan	Pertanggung jawaban	Risiko Operasional Kegiatan Laporan pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan fungsi tidak sesuai	ROO.19.03.5.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya peningkatan kualitas SDM	Internal	C	pelaksanaan tidak sesuai dengan bidangnya	DPMPTSP
	Administrasian Umum Perangkat Daerah										
	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Kegiatan	Penatausahaan	Risiko Operasional Kegiatan Laporan penyediaan komponen instansi listrik/ penerangan	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya terpenuhi sarana dan prasarana	Internal	C	penyediaan sarana kurang tepat	DPMPTSP

				bangunan kantor tidak sesuai							
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Kegiatan	Penatausahaan	Risiko Operasional Kegiatan Laporan penyediaan peralatan rumah tangga tidak sesuai	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya terpenuhi sarana dan prasarana	Internal	C	penyediaan sarana kurang tepat	DPMPTSP
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Kegiatan	Penatausahaan	Risiko Operasional Kegiatan Laporan penyediaan bahan logistik kantor tidak tepat waktu	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya terpenuhi sarana dan prasarana	Internal	C	penyediaan sarana kurang tepat	DPMPTSP
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Kegiatan	Penatausahaan	Risiko Operasional Kegiatan Laporan penyediaan barang cetakan dan penggandaan tidak sesuai	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya terpenuhi sarana dan prasarana	Internal	C	penyediaan sarana kurang tepat	DPMPTSP
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang-undangan	Terlaksananya Kegiatan	Penatausahaan	Risiko Operasional Kegiatan Laporan penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan tidak sesuai	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurang terpenuhi bahan bacaan	Internal	C	penyediaan bahan bacaan kurang tepat	DPMPTSP

	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarkan ya Jasa	Penatausahaan	Risiko Operasional Kegiatan Laporan penyedia jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik tidak tepat waktu	ROO.19.03.9.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya terpenuhi jasa komunikasi, SDA dan listrik	Internal	C	penyediaan jasa kurang tepat	DPMPTSP
	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Kegiatan	Penatausahaan	Risiko Operasional Kegiatan Laporan penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor kurang tepat	ROO.19.03.9.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya terpenuhi jasa sarana prasarana	Internal	C	penyediaan jasa kurang tepat	DPMPTSP
	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarkan ya Jasa	Penatausahaan	Risiko Operasional Kegiatan Laporan penyedia jasa pelayanan Umum Kantor kurang tepat	ROO.19.03.9.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya peningkatan kualitas SDM	Internal	C	penyediaan jasa pelayanan kurang tepat	DPMPTSP
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	Risiko Operasional Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan tidak sesuai	ROO.19.03.9.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurang terpeliharanya sarana prasarana	Internal	C	penyediaan jasa kurang tepat	DPMPTSP

	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insemtif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	Risiko Operasional Kegiatan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas tidak tepat waktu	ROO.19.03.1.18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ Penata Kelola Penanaman Modal	Berkas dokumentasi tidak lengkap	Internal	C	Perencanaan kurang tepat	DPMPTSP
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten /Kota										
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	Risiko Operasional Kegiatan peta potensi investasi tidak sesuai	ROO.19.03.1.18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ Penata Kelola Penanaman Modal	kurang koordinasi dengan Bappelitbangda	Internal	C	peta potensi tidak lengkap	DPMPTSP
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL										
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	Risiko Operasional Kegiatan pelaksanaan kegiatan promosi tidak sesuai	ROO.19.03.1.18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ Penata Kelola Penanaman	Kurang sesuai pelaksanaan kegiatan promosi	Internal	C	Pelaksnaan kegiatan promosi kurang tepat	DPMPTSP

						Modal					
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL										
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota										
	Penyediaan Pelayanan Perizinan berusaha berbasis resiko Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	Risiko Pemangku Kepentingan data perizinan per sektor setiap kecamatan belum	ROO.19.03.1.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ Penata Perizinan	kurang koordinasi dengan dinas terkait (tim teknis)	Eksternal	U C	sistem digital kurang memadai	Dinas kepada Masyarakat
	Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	Risiko Pemangku Kepentingan layanan dan pengelolaan konsultasi perizinan berbasis resiko belum	ROO.19.03.1.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ Penata Perizinan	kurang tersedianya sarana layanan konsultasi dan pengaduan	Eksternal	U C	Rendahnya kepuasan Masyarakat	Dinas kepada Masyarakat
	Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis resiko	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	Risiko Pemangku Kepentingan Pemantauan, analis, evaluasi dan pelaporan perizinan berusaha berbasis resiko belum	ROO.19.03.1.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ Penata Perizinan	kurang koordinasi dengan dinas terkait (tim teknis)	Eksternal	U C	Pelayanan kurang cepat	Dinas kepada Masyarakat

5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL										
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota										
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan kegiatan usahanya	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	Risiko Pemangku Kepentingan Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya belum	ROO.19.03.1.18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ Penata Kelola Penanaman Modal	kurang koordinasi dengan pelaku usaha	Eksternal	U C	Rendahnya kepuasan Masyarakat	Dinas kepada Masyarakat
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	Risiko Pemangku Kepentingan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha belum	ROO.19.03.1.18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ Penata Kelola Penanaman Modal	kurang ilmu pengetahuan pada pelaku usaha	Eksternal	U C	Rendahnya kepuasan Masyarakat	Dinas kepada Masyarakat
	Pengawasan Penanaman Modal	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	Risiko Pemangku Kepentingan Pengawasan penanaman	ROO.19.03.1.18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	kurang koordinasi dengan pelaku usaha	Eksternal	U C	Rendahnya kepuasan Masyarakat	Dinas kepada Masyarakat

				modal belum		Pintu/ Penata Kelola Penanaman Modal					
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL										
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	Risiko Operasional Kegiatan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan Informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem elektronik belum	ROO.19.03.1.18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ Penata Kelola Penanaman Modal	kurang optimalnya pengelolaan data secara elektronik	Internal	C	penyajian data tidak tepat	DPMPTSP

**Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Lamongan Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Lamongan Tahun Penilaian : 2025 Periode yang dinilai : 2025 Tujuan Strategis : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan Urusan Pemerintahan : Urusan Penanaman Modal OPD yang Dinilai : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Lamongan											
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
A	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan	Prosentase pertumbuhan ekonomi	Pengembangan Potensi Investasi Kurang Optimal	RSO.19.02.01.18	Bupati Lamongan	Kurangnya promosi investasi yang berdampak pada menurunnya minat investasi	Eksternal	UC	Prosentase pertumbuhan ekonomi rendah	Bupati Lamongan	
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah Baik PMDN maupun PMA	Prosentase Nilai Realisasi Investasi PMDN	Menurunnya Prosentase Nilai Realisasi Investasi PMDN	RSO.19.02.01.18		Pajak Daerah yang Tinggi	Eksternal	UC	Prosentase Nilai Realisasi Investasi Rendah	Investor	
		Prosentase Nilai Realisasi Investasi PMA	Menurunnya Prosentase Nilai Realisasi Investasi PMA	RSO.19.02.01.18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Regulasi dipandang masih rumit	Eksternal	UC	Prosentase Nilai Realisasi Investasi Rendah	Investor	

	Program Pelayanan Penanaman Modal	Prosentase Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu	Menurunnya Prosentase Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu	RSO.19.02.01.18	Bidang Penata perizinan	Alur koordinasi yang terlalu panjang dari DPMPTSP ke perangkat daerah lain	Eksternal	UC	Tingkat Kepuasan Masyarakat rendah	Pemohon/penerima layanan
	Program pengembangan iklim penanaman modal	Presentase peningkatan minat investasi	Menurunnya jumlah investor PMA dan PMDN	RSO.19.02.01.18	Bidang Penata kelola Penanaman modal	Kurangnya informasi potensi investasi di Kabupaten Lamongan	Eksternal	UC	Presentase minat investasi rendah	Investor
	Program Promosi Penanaman Modal	Presentase promosi penanaman modal yang dilaksanakan	Menurunnya kegiatan promosi penanaman modal yang dilaksanakan	RSO.19.02.01.18	Bidang Penata kelola Penanaman modal	Anggaran yang tidak tersedia tidak sesuai ketentuan	Eksternal	UC	Menurunnya minat investasi karena informasi potensi investasi di Kabupaten Lamongan kurang dipromosikan	Investor
	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Presentase pengendalian perusahaan yang berinvestasi	Menurunnya perusahaan yang melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	RSO.19.02.01.18	Bidang Penata kelola Penanaman modal	Kurang pahamnya perusahaan akan kewajiban penyampaian LKPM	Eksternal	UC	Pengendalian dan pengawasan perusahaan menjadi terhambat	Perusahaan/Pelaku usaha
2	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Nilai IKM/SKM	Menurunnya Nilai IKM/SKM akibat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan tidak dapat dilaksanakan dengan prima	RSO.19.02.01.18	Bidang Penata perizinan	SDM pelayanan yang belum optimal	Eksternal	UC	Tingkat Kepuasan Masyarakat rendah	Pemohon/penerima layanan
		Nilai SAKIP DPMPTSP	Menurunnya Nilai SAKIP DPMPTSP	RSO.19.02.04.18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Kurangnya inovasi/perbaikan terkait manajemen kinerja	Eksternal	UC	Tingkat Kepuasan Masyarakat rendah dan efektivitas pelayanan rendah	Pemohon/penerima layanan

Dinas Terkait
Pelaporan
Kertas Kerja Strategis OPD

Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Nama OPD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun Penilaian	2025
Periode yang Dinilai	2025
Tujuan Strategis	Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Urusan Pemerintahan	Penanaman Modal
OPD yang dinilai	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tujuan Strategis Pemerintah	Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Sasaran	1. Meningkatnya Penduduk yang Bekerja 2. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Action
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
1	Prosentase Nilai Realisasi Investasi PMDN	Menurunnya Prosentase Nilai Realisasi Investasi PMDN	RSO.19.02.01.18	Kepala Dinas	Pajak Daerah Yang Tinggi	Eksternal	UC	Prosentase Nilai Realisasi investasi rendah	Investor	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
2	Prosentase Nilai Realisasi Investasi PMA	Menurunnya Prosentase Nilai Realisasi Investasi PMA	RSO.19.02.01.18	Kepala Dinas	Regulasi dipandang masih rumit	Eksternal	UC	Prosentase Nilai Realisasi investasi rendah	Investor	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
3	Prosentase Penyelesaian Perizinan Tepat waktu	Menurunnya Prosentase Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu	RSO.19.02.01.18	Penata Perizinan	Alur koordinasi yang terlalu panjang dari DPMPTSP ke Perangkat Daerah lain	Eksternal	UC	Tingkat Kepuasan Masyarakat rendah	Pemohon/Penerima layanan	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
4	Prosentase Peningkatan minat investasi	Menurunnya Jumlah investor PMA dan PMDN	RSO.19.02.01.18	Penata Kelola Penanaman Modal	Kurangnya informasi potensi investasi	Eksternal	UC	Prosentase minat investasi rendah	Investor	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
5	Prosentase Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	Menurunnya kegiatan promosi penanaman modal yang dilaksanakan	RSO.19.02.01.18	Penata Kelola Penanaman Modal	kurangnya kegiatan promosi	Eksternal	UC	Menurunnya minat investasi karena informasi potensi investasi	Investor	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
6	Prosentase Pengendalian Perusahaan yang berinvestasi	Menurunnya Perusahaan yang melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	RSO.19.02.01.18	Penata Kelola Penanaman Modal	Kurang pahamnya perusahaan akan kewajiban penyampaian LKPM	Eksternal	UC	Pengendalian dan pengawasan Perusahaan menjadi terhambat	Perusahaan/ pelaku usaha	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
7	Nilai IKM/SKM	Menurunnya Nilai IKM/SKM akibat Pelayanan Perizinan dan non Perizinan tidak dapat dilaksanakan dengan prima	RSO.19.02.01.18	Penata Perizinan	SDM pelayanan yang belum optimal	Eksternal	UC	Tingkat Kepuasan Masyarakat rendah	Pemohon/Penerima layanan	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
8	Nilai SAKIP DPMPTSP	Menurunnya Nilai SAKIP DPMPTSP	RSO.19.02.04.18	Kepala Dinas	Kurangnya inovasi/perbaikan terkait manajemen kinerja	Internal	C	Tingkat Kepuasan Masyarakat rendah	Pemohon/Penerima layanan	<button>Edit</button>

☰ Dinas Terkait

☷ Pelaporan

Tambah Kertas Kerja Operasional Pemda

Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Nama OPD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun Penilaian	2025
Periode yang Dinilai	2025
Tujuan Strategis	
Sasaran strategis OPD	
Urusan Pemerintahan	Penanaman Modal
OPD yang Dinilai	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/U/C	Dampak		Action
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan	Perencanaan	Laporan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah tidak sesuai	ROO.19.03.36.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya koordinasi dengan Bappelitbangda	internal	C	Perencanaan kurang tepat	DPMPTSP	Edit Hapus
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan	Perencanaan	Laporan Evaluasi perangkat daerah kurang tepat	ROO.19.03.36.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya koordinasi dengan Bappelitbangda	internal	C	Perencanaan kurang tepat	DPMPTSP	Edit Hapus
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya Jaminan	Pertanggung jawaban	Laporan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak tepat waktu	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya Koordinasi dengan BPKAD	internal	C	Pembayaran tidak dapat segera direalisasikan	DPMPTSP	Edit Hapus
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Kegiatan	Pelaporan	koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD tidak tepat waktu	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya Koordinasi dengan BPKAD	internal	C	Pelaporan kurang tepat waktu	DPMPTSP	Edit Hapus
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Terlaksananya Kegiatan	Pelaporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD tidak tepat waktu	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya Koordinasi dengan BPKAD	internal	C	Pelaporan kurang tepat waktu	DPMPTSP	Edit Hapus
6	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Kegiatan	Penatausahaan	Laporan penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor tidak sesuai	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya terpenuhi sarana dan prasarana	internal	C	penyediaan sarana kurang tepat	DPMPTSP	Edit Hapus
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Kegiatan	Penatausahaan	Laporan penyediaan peralatan rumah tangga tidak sesuai	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya terpenuhi sarana dan prasarana	internal	C	penyediaan sarana kurang tepat	DPMPTSP	Edit Hapus
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Kegiatan	Penatausahaan	Laporan penyediaan bahan logistik kantor tidak tepat waktu	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya terpenuhi sarana dan prasarana	internal	C	penyediaan sarana kurang tepat	DPMPTSP	Edit Hapus

☰ Dinas Terkait

☰ Pelaporan

Kertas Kerja Strategis OPD

Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Nama OPD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun Penilaian	2025
Periode yang Dinilai	2025
Tujuan Strategis	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa
Urusan Pemerintahan	Penanaman Modal
OPD yang dinilai	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tujuan Strategis Pemerintah	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa
Sasaran	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah Meningkatnya Pemberdayaan Desa

No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Action
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
1	Prosentase Nilai Realisasi Investasi PMDN	Menurunnya Prosantase Nilai Realisasi Investasi PMDN	RSO.19.02.01.18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pajak Daerah Yang Tinggi	Eksternal	UC	Prosentase Nilai Realisasi investasi rendah	Investor	Edit Hapus
2	Prosentase Nilai Realisasi Investasi PMA	Menurunnya Prosantase Nilai Realisasi Investasi PMA	RSO.19.02.01.18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Regulasi dipandang masih rumit	Eksternal	UC	Prosentase Nilai Realisasi investasi rendah	Investor	Edit Hapus
3	Prosentase Penyelesaian Prizinan Tepat Waktu	Menurunnya Prosantase Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu	RSO.19.02.01.18	Penata Perizinan	Alur koordinasi yang terlalu panjang dari DPMPTSP ke Perangkat Daerah lain	Eksternal	UC	Tingkat Kepuasan Masyarakat rendah	Pemohon/Penerima layanan	Edit Hapus
4	Prosentase Peningkatan minat investasi	Menurunnya Jumlah investor PMA dan PMDN	RSO.19.02.01.18	Penata Kelola Penanaman Modal	Kurangnya informasi potensi investasi	Eksternal	UC	Prosentase minat investasi rendah	Investor	Edit Hapus
5	Prosentase Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	Menurunnya kegiatan promosi penanaman modal yang dilaksanakan	RSO.19.02.01.18	Penata Kelola Penanaman Modal	kurangnya kegiatan promosi	Eksternal	UC	Menurunnya minat investasi karena informasi potensi investasi	Investor	Edit Hapus
6	Prosentase Pengendalian Perusahaan yang berinvestasi	Menurunnya Perusahaan yang melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	RSO.19.02.01.18	Penata Kelola Penanaman Modal	Kurang pahamnya perusahaan akan kewajiban penyampaian LKPM	Eksternal	UC	Pengendalian dan pengawasan Perusahaan menjadi terhambat	Perusahaan/ pelaku usaha	Edit Hapus
7	Nilai IKM/SKM	Menurunnya Nilai IKM/SKM akibat Pelayanan Perizinan dan non Perizinan tidak dapat dilaksanakan dengan prima	RSO.19.02.01.18	Penata Perizinan	SDM pelayanan yang belum optimal	Eksternal	UC	Tingkat Kepuasan Masyarakat rendah	Pemohon/Penerima layanan	Edit Hapus
8	Nilai SAKIP DPMPTSP	Menurunnya Nilai SAKIP DPMPTSP	RSO.19.02.01.18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya inovasi/ perbaikan terkait manajemen kinerja	internal	C	Tingkat Kepuasan Masyarakat rendah	DPMPTSP	Edit

📁 Dinas Terkait
📄 Pelaporan

Tambah Kertas Kerja Operasional Pemda

Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Nama OPD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun Penilaian	2025
Periode yang Dinilai	2025
Tujuan Strategis	
Sasaran strategis OPD	
Urusan Pemerintahan	Penanaman Modal
OPD yang Dinilai	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak		Action
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan	Perencanaan	Laporan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah tidak sesuai	ROO.19.03.36.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya koordinasi dengan Bapelitebangda	internal	C	Perencanaan kurang tepat	DPMPTSP	Edit Hapus
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan	Perencanaan	Laporan Evaluasi perangkat daerah kurang tepat	ROO.19.03.36.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya koordinasi dengan Bapelitebangda	internal	C	Evaluasi Perangkat daerah kurang tepat	DPMPTSP	Edit Hapus
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya Jaminan	Pertanggung jawaban	Laporan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak tepat waktu	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya Koordinasi dengan BPKAD	internal	C	Pembayaran tidak dapat segera direalisasikan	DPMPTSP	Edit Hapus
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Kegiatan	Pelaporan	koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD tidak tepat waktu	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya Koordinasi dengan BPKAD	internal	C	Pelaporan kurang tepat waktu	DPMPTSP	Edit Hapus
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Kegiatan	Pelaporan	koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD tidak tepat waktu	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya Koordinasi dengan BPKAD	internal	C	Pelaporan kurang tepat waktu	DPMPTSP	Edit Hapus
6	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Kegiatan	Penatausahaan	Laporan penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor tidak sesuai Microsoft Edge	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya terpenuhi sarana dan prasarana	internal	C	penyediaan sarana kurang tepat	DPMPTSP	Edit Hapus

7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Kegiatan	Penatausahaan	Laporan penyediaan peralatan rumah tangga tidak sesuai	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya terpenuhi sarana dan prasarana	internal	C	penyediaan jasa kurang tepat	DPMPTSP	Edit	Hapus	
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Kegiatan	Penatausahaan	Laporan penyediaan bahan logistik kantor tidak tepat waktu	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya terpenuhi sarana dan prasarana	internal	C	penyediaan sarana kurang tepat	DPMPTSP	Edit	Hapus	
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Kegiatan	Penatausahaan	Laporan penyediaan barang cetakan dan penggandaan tidak sesuai	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya terpenuhi sarana dan prasarana	internal	C	penyediaan sarana kurang tepat	DPMPTSP	Edit	Hapus	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Terlaksananya Kegiatan	Penatausahaan	Laporan penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan tidak sesuai	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	kurangnya terpenuhi bahan bacaan	internal	C	penyediaan bahan bacaan kurang tepat	DPMPTSP	Edit	Hapus	
11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Kegiatan	Penatausahaan	Laporan fasilitasi kunjungan tamu tidak tepat waktu	ROO.19.03.37.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurang terjamin fasilitas tamu	internal	C	penyediaan makan minum tamu kurang tepat	DPMPTSP	Edit	Hapus	
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Kegiatan	Pertanggung jawaban	Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD tidak tepat waktu	ROO.19.03.5.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya peningkatan kualitas SDM	internal	C	pelaksanaan tidak sesuai dengan bidangnya	DPMPTSP	Edit	Hapus	
13	Penyedia Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Terbayarkannya Jasa	Penatausahaan	Laporan penyedia jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik tidak tepat waktu	ROO.19.03.9.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya terpenuhi jasa komunikasi, SDA dan listrik	internal	C	penyediaan jasa kurang tepat	DPMPTSP	Edit	Hapus	
14	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Kegiatan	Penatausahaan	Laporan penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor kurang tepat	ROO.19.03.9.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya terpenuhi sarana dan prasarana	internal	C	penyediaan jasa kurang tepat	DPMPTSP	Edit	Hapus	
15	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarkannya Jasa	Penatausahaan	Laporan penyedia jasa pelayanan Umum Kantor kurang tepat	ROO.19.03.9.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya peningkatan kualitas SDM	internal	C	penyediaan jasa kurang tepat	DPMPTSP	Edit	Hapus	
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	penyediaan jasa pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan tidak sesuai	ROO.19.03.9.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurang terpelihaarananya sarana prasarana	internal	C	penyediaan jasa kurang tepat	DPMPTSP	Edit	Hapus	
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	penyediaan jasa pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan tidak sesuai	ROO.19.03.9.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurang terpelihaarananya sarana prasarana	internal	C	penyediaan jasa kurang tepat	DPMPTSP	Edit	Hapus	

	18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	pemeliharaan peralatan dan mesin tidak tepat waktu	ROO.19.03.9.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurang terpeliharanya sarana prasarana	internal	C	penyediaan jasa kurang tepat	DPMPTSP	Edit	Hapus		
	19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	pemeliharaan/ rehab gedung tidak tepat waktu	ROO.19.03.9.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya terpenuhi sarana dan prasarana	internal	C	penyediaan jasa kurang tepat	DPMPTSP	Edit	Hapus		
	20	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insemtif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas tidak tepat waktu	RSO.19.02.01.18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Berkas dokumentasi tidak lengkap	internal	C	Perencanaan kurang tepat	DPMPTSP	Edit	Hapus		
	21	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	peta potensi investasi tidak sesuai	ROO.19.03.1.18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurangnya koordinasi dengan Bappelitbangda	internal	C	peta potensi tidak lengkap	DPMPTSP	Edit	Hapus		
	22	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	pelaksanaan kegiatan promosi tidak sesuai	ROO.19.03.1.18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kurang sesuai pelaksanaan kegiatan promosi	internal	C	Pelaksanaan kegiatan promosi kurang tepat	DPMPTSP	Edit	Hapus		
	23	Penyediaan Pelayanan Perizinan berusaha berbasis resiko Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	data perizinan per sektor setiap kecamatan belum	ROO.19.03.1.18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	kurang koordinasi dengan dinas terkait (tim teknis)	Eksternal	UC	sistem digital kurang memadai	Pemohon/Penerima layanan	Edit	Hapus		
	24	Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	Layanan dan pengelolaan konsultasi perizinan berbasis resiko belum	ROO.19.03.1.24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	kuang tersedianya sarana layanan konsultasi dan pengaduan	Eksternal	UC	Rendahnya kepuasan Masyarakat	Pemohon/Penerima layanan	Edit	Hapus		
	25	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan kegiatan usahanya	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya belum	ROO.19.03.1.18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	kurang koordinasi dengan pelaku usaha	Eksternal	UC	Rendahnya kepuasan Masyarakat	pelaku usaha	Edit	Hapus		
	26	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha belum	ROO.19.03.1.18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	kurang ilmu pengetahuan pada pelaku usaha	Eksternal	UC	Rendahnya kepuasan Masyarakat	pelaku usaha	Edit	Hapus		
	27	Pengawasan Penanaman Modal	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	Pengawasan Penanaman Modal belum optimal	ROO.19.03.1.18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	kurang koordinasi dengan pelaku usaha	Eksternal	UC	Rendahnya kepuasan Masyarakat	Perusahaan/ pelaku usaha	Edit	Hapus		
	28	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya Kegiatan	Pelaksanaan	pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan Informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem elektronik belum	ROO.19.03.1.18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	kurang optimalnya pengelolaan data secara elektronik	internal	C	penyajian data tidak tepat	DPMPTSP	Edit	Hapus		